Indonesia Nomor 5234) 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik	ng Nomor 12 T	Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	DASAR HUKUM		PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM.42 BANDAR SERI BENTAN
	4. Mehami tugas dan fi	3. Memahami peratura	2. Memahami Komputer	1. Pelaksana	Kualifikasi Pelaksana	Nama SOP	NOMOR SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
	ungsi pekerjaan	Memahami peraturan perundang-undangan Mehami tugas dan fungsi pekerjaan	H			PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	B/1159/180/VI/2022 23 JUNI 2022 PIh.SEKRETARIS DAEFAH VIJKABUPAREN BINTAN Orh. KARTINI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621017 198902 2 002

PENCATATAN DAN PENDATAAN	PERINGATAN
4. Internet	Pembentukan Produk Hukum
3. ATK	Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan
2. Perlengkapan Komputer	Hukum
1. Asli Produk Hukum (Hardcopy & Softcopy)	 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bantuan
PERALATAN/PERLENGKAPAN	KETERKAITAN
	Nomor 73)
000	Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
Si	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
18	8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang
	Bintan Nomor 1 Tahun 2015)
ä	Hukum Kabupaten Bintun (Berita Daerah Kabupaten
Si	Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
6	7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang
	692).
1	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor
<u>n</u>	Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum
σā	Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Ď.	6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Repulik Indonesia Tahun 2014, Nomor 33).
ಖ	Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
n	Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian
n	Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan
a ·	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
	Tahun 2012 Nomor 82).
a	Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
z	2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
	4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

	4.	'n	2.			NO
dilakukan scanner kemudian disimpan dalam bentuk format "pdf" kemudian disimpan sesuai folder	Petugas JDIH mengkonversi file Ms. Word file Produk Hukum ke format "pdf" dan untuk arsip Produk Hukum lama	Meniliti kesesuaian antara softfile dan hardfile produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan melakukan tautan peraturan perundangan dengan JDIHN	Petugas Pengelola memberikan softcopy file Produk Hukum kepada petugas JDIH	Softcopy File Produk Hukum		Uraian Prosedur
				Mulai	Pengadministrasian Hukum	
			2		Penyajian Data	Pelaksana
€ .	4	υ			Pengolah JDIH	n
					Kabag Hukum	
	Flashdisk Komputer PrinterScaner	Soft File Hard File Komputer Internet	Soft File Hard File	Soft File Hard File	Kelengkapan	
	Menit	Menit	5 Menit	5 Menit	Waktu	Mutu Baku
	Dokumen Produk Hukum berbentuk softcopy PDF	Tersedianya file Produk Hukum yang akan dialih format	Tersedianya Softfile dan Hard File	Tersedianya Softfile dan Hard File	Output	aku

	atasan	Melaporkan kepada	jdih.bintankab.go.id	website	Produk Hukum Ke	Produk / Menginput	menyebarluaskan	5. Petugas JDIH
			•				Λ	
PEN CAN	SELESAI							
PIh. SEKRETARIS DAERAH () Drh. KARTINI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621017 198902 2 002	Kompuetr Printer	ATK			website	Aplikasi	Internet	Komputer
ARIS DAI	Menit	15					Menit	15
ERAH () . ### TUDA ### 1002	dipublikasikan	Daftar Produk			di Website JUIH	Yang terunggah	Hukum/Dokumen	Produk